

Perbandingan Sekuritisasi Imigrasi Era Barack Obama dan Donald Trump sebagai Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat

Isnaya Syahrana

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: nayaasyahraa@gmail.com

Nur Isdah Idris

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: Nurisdah@unhas.ac.id

Abstract. *Immigration has become a central issue in U.S. national security policy, especially after the events of September 11, 2001. The discourse around immigration is increasing, especially in the context of national security policy, which leads to the securitization of immigration. This process constructs immigration as a security threat, which justifies a strict political and policy response. In former President Obama's perspective, U.S. immigration policy has been focused on national security since the beginning of his presidency. This emphasis is manifested through increased border surveillance and inclusive and humane immigration law enforcement through the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program. Instead, Donald Trump's administration adopted a more secure approach, focusing on border security and immigration restrictions, including a controversial border wall and travel ban. This shift reflects a broader shift in U.S. domestic politics and global perceptions. Understanding these differences provides insight into how immigration policy impacts U.S. national and public security.*

Keywords: *Securitization, Immigration, United States, National Security, Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).*

Abstrak. Imigrasi telah menjadi isu sentral dalam kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat, terutama setelah peristiwa 11 September 2001. Wacana seputar imigrasi semakin meningkat, terutama dalam konteks kebijakan keamanan nasional, yang mengarah pada sekuritisasi imigrasi. Proses ini mengkonstruksi imigrasi sebagai ancaman keamanan, yang menjustifikasi respon politik dan kebijakan yang ketat. Dalam perspektif mantan Presiden Obama, kebijakan imigrasi AS telah difokuskan pada keamanan nasional sejak awal masa kepresidenannya. Penekanan ini dimanifestasikan melalui peningkatan pengawasan perbatasan dan penegakan hukum imigrasi yang inklusif dan humanis melalui program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Sebaliknya, pemerintahan Donald Trump mengadopsi pendekatan yang lebih sekuriti, dengan fokus pada keamanan perbatasan dan pembatasan imigrasi, termasuk tembok perbatasan yang kontroversial dan larangan perjalanan. Pergeseran ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam politik domestik AS dan persepsi global. Memahami perbedaan-perbedaan ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan imigrasi berdampak pada keamanan nasional dan masyarakat Amerika Serikat.

Kata Kunci: Sekuritisasi, Imigrasi, Amerika Serikat, Keamanan Nasional, Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

LATAR BELAKANG

Imigrasi telah menjadi salah satu isu paling esensial dalam kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir. Kebijakan imigrasi tidak hanya mempengaruhi demografi sebuah negara, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keamanan, ekonomi, dan stabilitas sosial. Diskursus mengenai imigrasi semakin intens dalam konteks kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat, terutama sejak terjadinya serangan 11 September 2001 yang mengakibatkan perubahan paradigma keamanan global.

Dalam hal ini, sekuritisasi imigrasi menjadi sangat penting, mengacu pada proses di mana isu imigrasi dikonstruksi sebagai ancaman keamanan yang memerlukan respons politik dan kebijakan yang ketat. Lebih jauh, pemerintah sering kali menggunakan retorika yang menggambarkan imigran sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional untuk membenarkan langkah-langkah kebijakan yang lebih keras dan proteksionis (Ong, 2018). Sehingga proses sekuritisasi ini menjadi sangat menonjol dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat, terutama selama masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump.

Selama masa kepemimpinan Barack Obama dari tahun 2009-2017, pendekatan terhadap imigrasi menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keamanan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintahan Obama menekankan perlunya melindungi imigran yang telah lama tinggal di Amerika Serikat, sambil tetap menegakkan hukum imigrasi yang ada. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah program *Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)*, yang diperkenalkan pada tahun 2012. Program ini memberikan perlindungan dari deportasi dan izin kerja sementara kepada ribuan imigran muda yang dikenal sebagai *Dreamers*. Meskipun demikian, Obama juga mengadopsi langkah-langkah sekuritisasi tertentu, seperti peningkatan deportasi bagi imigran yang terlibat dalam kejahatan serius dan peningkatan pengawasan perbatasan. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional (Jie Zong, 2018).

Sebaliknya, ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, pendekatan yang jauh lebih keras terhadap imigrasi diperkenalkan. Trump menggunakan retorika yang menekankan pentingnya mengamankan perbatasan Amerika Serikat sebagai langkah kunci dalam melindungi keamanan nasional, dari ancaman ilegalitas yang dianggap berasal dari imigrasi yang tidak terkontrol. Pendekatan Trump terhadap imigrasi sangat didasarkan pada konsep sekuritisasi. Retorikanya sering kali menggambarkan imigran sebagai ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan ekonomi Amerika Serikat. Kebijakan seperti larangan perjalanan bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim dan peningkatan penahanan imigran ilegal menunjukkan bagaimana sekuritisasi imigrasi digunakan untuk membenarkan tindakan keras dan proteksionis (Brown, 2020).

Perdebatan tentang kebijakan imigrasi di Amerika Serikat bukan hanya masalah domestik, tetapi juga memiliki implikasi global yang luas. Amerika Serikat sebagai pemimpin global sering kali menjadi sorotan dalam diskusi mengenai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan etika dalam kebijakan luar negeri. Kebijakan yang lebih inklusif seperti yang diterapkan oleh Obama mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan inklusi sosial, sementara kebijakan

yang lebih keras seperti yang diterapkan oleh Trump mencerminkan pendekatan yang lebih proteksionis dan nasionalis (M.Ahonen, 2019). Dalam konteks yang lebih luas, perubahan kebijakan imigrasi dari era Obama ke Trump juga mencerminkan perubahan dalam politik domestik Amerika Serikat. Secara keseluruhan, kebijakan imigrasi di Amerika Serikat adalah cerminan dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Tulisan ini akan membandingkan bagaimana sekuritisasi imigrasi di era Obama dan Trump serta menilai dampak dari kebijakan yang diterapkan terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

KAJIAN TEORITIS

Dalam memahami perbandingan sekuritisasi imigrasi sebagai strategi keamanan nasional Amerika Serikat di era Obama dan Trump, terdapat beberapa teori dan konsep penting yang mendukung analisis ini. Salah satu teori utama yang relevan adalah teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Copenhagen School. Teori ini pertama kali dijelaskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, dan sejumlah ahli lainnya dalam buku mereka yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* (1998). Teori ini menjelaskan bagaimana isu-isu yang dianggap sebagai ancaman (sekuritas) ditingkatkan menjadi isu keamanan yang mendesak, memicu respons politik dan kebijakan yang ketat. Dalam konteks kebijakan imigrasi Amerika Serikat, sekuritisasi mengacu pada proses di mana imigrasi dikonstruksi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, yang membenarkan tindakan keras seperti pengawasan perbatasan yang ketat, deportasi massal, dan pembatasan imigrasi (Buzan et al., 1998). Konsep sekuritisasi ini sangat relevan dalam memahami bagaimana pemerintah Amerika Serikat di bawah Obama dan Trump merespons isu imigrasi. Kebijakan imigrasi Obama, seperti program *Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)*, mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia, meskipun tetap menegakkan hukum imigrasi yang ada. Di sisi lain, pemerintahan Trump mengadopsi pendekatan yang lebih keras dengan fokus yang lebih besar pada sekuritisasi imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko dan pengetatan kebijakan imigrasi lainnya (Walters, 2019).

Dalam konteks ini, Keterkaitan teori sekuritisasi dari Copenhagen School dengan topik perbandingan sekuritisasi imigrasi di era Obama dan Trump memberikan wawasan tentang bagaimana narasi politik dan kebijakan publik tentang imigrasi berubah dari masa ke masa. Perbandingan ini memungkinkan untuk menganalisis bagaimana perubahan politik domestik dan global mempengaruhi pembentukan kebijakan imigrasi, serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi keamanan nasional, stabilitas sosial, dan hubungan internasional Amerika Serikat. (Buzan et al., 1998). Secara praktis, teori sekuritisasi juga membantu dalam memahami

implikasi kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Obama dan Trump. Analisis ini dapat membantu dalam membedakan antara berbagai strategi kebijakan yang diterapkan oleh dua pemerintahan yang berbeda, serta dalam menjelaskan bagaimana strategi ini diterima oleh masyarakat Amerika Serikat dan internasional.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan wawasan yang berharga mengenai kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, khususnya di bawah pemerintahan Obama dan Trump. Misalnya, Menjívar dan Kanstroom (2019) mengkaji konsekuensi kemanusiaan dari kebijakan imigrasi Trump, menyoroti dampaknya terhadap hak asasi manusia dan kondisi kemanusiaan imigran. Terdapat pula penelitian lain oleh Firda Nabilla yaitu Analisis Langkah Sekuritisasi oleh Amerika Serikat melalui Kebijakan Travel Ban Donald Trump 2016-2018, yang berfokus pada efektivitas kebijakan Travel Ban dan menjelaskan bahwasanya sekuritisasi yang dilakukan Amerika Serikat melalui kebijakan tersebut mengakibatkan pelanggaran dan kekerasan secara tidak langsung bagi pengungsi dan imigran sehingga dapat dikategorikan bahwa kebijakan tersebut kurang efektif. Adapun penelitian yang berhasil diterbitkan oleh Global Affairs tentang *A country of immigrants no more? The securitization of immigration in the National Security Strategies of the United States of America*, mengulas tentang bagaimana karakteristik kebijakan imigrasi yang diberlakukan di bawah pemerintahan Obama dan Trump dalam rangka mencapai keamanan nasional bagi Amerika Serikat.

Dari berbagai penelitian tersebut, penulis berusaha untuk memberikan alternatif analisis mengenai perbandingan kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Barack Obama dan Donald Trump sebagai salah satu strategi bagi kondisi keamanan nasional Amerika Serikat selama masa pemerintahan mereka masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis perbandingan sekuritisasi imigrasi di era Obama dan Trump sebagai strategi keamanan nasional Amerika Serikat. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perubahan kebijakan imigrasi dari waktu ke waktu, serta dampaknya terhadap keamanan nasional. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data sekunder yang berupa data atau temuan yang telah ada dan dipublikasikan sebelumnya oleh berbagai lembaga riset, dan sumber-sumber lainnya. Selain itu, tulisan ini juga mengumpulkan berbagai literatur akademis, artikel jurnal, dan laporan riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekuritisasi Imigrasi Era Pemerintahan Barack Obama

Pada era pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan imigrasi, dengan fokus utama pada integrasi sosial dan keamanan nasional. Obama menetapkan beberapa kebijakan utama untuk mengatasi masalah imigrasi yang ada, dengan tujuan utama untuk mengurangi ketidakpastian hukum bagi jutaan imigran yang tinggal di AS secara ilegal. Kebijakan yang diterapkan oleh Obama adalah *Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)*. Terdapat pula program Reformasi Imigrasi Komprehensif yaitu usulan legislatif yang diajukan oleh Obama kepada Kongres pada tahun 2013. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan penegakan hukum imigrasi, menyediakan jalur legal bagi jutaan imigran yang tinggal di AS secara ilegal, dan memperkuat sistem keamanan perbatasan AS. Rancangan undang-undang ini mencakup penyatuan keluarga, perlindungan imigran yang telah menjadi bagian dari masyarakat AS, serta peningkatan pengawasan perbatasan AS. (Cohen, 2014). Namun, reformasi ini walau mendapatkan dukungan awal dari kedua partai di Kongres, usulan ini tidak berhasil melewati uji coba di Senat karena perpecahan politik yang dalam mengenai masalah imigrasi. (Lind, 2015).

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), yang diperkenalkan pada tanggal 15 Juni 2012 melalui memorandum oleh Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Janet Napolitano, adalah kebijakan yang memberikan perlindungan terbatas kepada individu yang dibawa ke Amerika Serikat sebagai anak-anak tanpa izin imigrasi yang sah. *DACA* didesain untuk memberikan solusi sementara bagi mereka yang tumbuh dewasa di AS dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat Amerika Serikat. Tujuan utama *DACA* adalah untuk mengurangi ketidakpastian hukum bagi mereka yang telah tinggal di AS sejak masa kecil. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada imigran yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan status kebersihan dari deportasi sementara, bersama dengan izin bekerja yang diperpanjang setiap dua tahun sekali (United States Citizenship and Immigration Services, 2020). Kriteria kelayakan untuk *DACA* meliputi beberapa syarat yaitu telah tinggal di Amerika Serikat sejak 15 Juni 2007, masuk atau memiliki status yang sesuai pada usia 16 tahun, berada di bawah usia 31 tahun pada tanggal 15 Juni 2012, berada di AS saat menerapkan *DACA* dan pada saat menerima status *DACA*, tidak dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional atau keamanan publik, mendaftar di sekolah dan memiliki gelar sekolah menengah atas atau setara, atau telah dihormati dengan GED. Adapun proses aplikasi *DACA* melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh individu yang ingin mengajukan permohonan yaitu, (1)

Pengajuan Formulir, calon penerima DACA harus mengajukan Formulir I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals, secara lengkap dan akurat. (2) Formulir Biometrik, Selain Formulir I-821D, calon penerima DACA juga diharuskan mengajukan Formulir I-765, Application for Employment Authorization, untuk memperoleh izin bekerja di AS. (3) Bukti Identitas, Pemohon juga harus menyertakan bukti identitas mereka, seperti paspor atau bukti lainnya yang sah. (4) Bukti Kedatangan, DACA membutuhkan bukti bahwa pemohon telah hadir di AS sebelum tanggal tertentu dan untuk periode waktu tertentu. (5) Biaya Aplikasi, Aplikasi DACA memerlukan pembayaran biaya aplikasi yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Setelah diterima, aplikasi DACA diproses oleh USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) untuk menentukan apakah kriteria untuk menerima DACA telah terpenuhi. (Benenson, 2024).

Implementasi DACA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Program ini memungkinkan pemerintah AS untuk lebih fokus pada penegakan hukum terhadap imigran yang merupakan ancaman nyata terhadap keamanan. Imigran yang memenuhi syarat untuk DACA telah melewati pemeriksaan latar belakang yang ketat, sehingga memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memantau mereka secara lebih efektif. (Alberto Beltan et al., 2018) DACA juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian AS. Imigran yang mendapatkan status DACA secara ekonomi berkontribusi melalui pembayaran pajak dan konsumsi barang dan jasa. Dalam sebuah studi, ditemukan bahwa kebijakan ini membantu meningkatkan pendapatan dan konsumsi domestik, serta memperkuat perekonomian AS secara keseluruhan (Jamie Peck, 2018). Selain itu, imigran DACA juga berkontribusi dalam berbagai sektor pekerjaan, termasuk teknologi, pendidikan, dan kesehatan, yang meningkatkan produktivitas dan inovasi ekonomi AS. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, membantu meningkatkan integrasi sosial dan ekonomi mereka di AS. DACA menerima respons yang bervariasi dari masyarakat AS. Sejumlah survei dan polling menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat AS mendukung kebijakan ini. Sebuah survei dari Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sekitar 74% responden mendukung program DACA, sementara 24% menentangnya (Pew Research Center, 2017). Dukungan ini sebagian besar didorong oleh keinginan untuk memberikan kesempatan kepada imigran muda yang telah lama tinggal di AS untuk tetap berkontribusi dan menjadi bagian dari masyarakat AS tanpa ancaman deportasi. Namun, ada juga yang menentang DACA, terutama dari kalangan yang memandang kebijakan ini sebagai langkah unilateral yang melebihi kewenangan presiden. Kritik juga muncul terkait

dengan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan ini terhadap masyarakat AS.

Dalam hal respons dari kelompok kepentingan, DACA juga mendapatkan dukungan dari organisasi hak asasi manusia dan lembaga advokasi imigran. ACLU (American Civil Liberties Union) mendukung DACA sebagai langkah yang penting untuk melindungi hak-hak imigran muda di AS, sambil menyerukan perlindungan yang lebih luas bagi imigran lainnya (American Civil Liberties Union (ACLU), n.d.). ACLU menilai DACA sebagai langkah yang progresif dalam upaya melindungi imigran dari diskriminasi dan ancaman deportasi. Di sisi lain, ada kritik dari beberapa kelompok konservatif dan lembaga advokasi imigrasi yang menentang DACA. Mereka berpendapat bahwa program ini tidak hanya melebihi kewenangan presiden, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem imigrasi AS secara keseluruhan dengan memberikan perlindungan kepada imigran yang tinggal di AS secara ilegal. (University of Louisville, 2024)

B. Sekuritisasi Imigrasi Era Pemerintahan Donald Trump

Pemerintahan Donald Trump mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam kebijakan imigrasi dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Fokus utamanya adalah pada penegakan hukum yang lebih ketat dan penerapan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah imigran yang masuk ke Amerika Serikat. Strategi sekuritisasi ini dilakukan melalui beberapa kebijakan utama: pembangunan tembok perbatasan, pelarangan perjalanan (travel ban), dan kebijakan zero tolerance terhadap imigrasi ilegal.

Salah satu kebijakan paling terkenal dari Trump adalah rencana pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Trump berpendapat bahwa tembok ini diperlukan untuk menghentikan arus masuk imigran ilegal, narkoba, dan ancaman keamanan lainnya. Meskipun proyek ini menghadapi banyak hambatan hukum dan pembiayaan, beberapa bagian dari tembok tersebut tetap dibangun selama masa jabatannya. Trump menekankan bahwa tembok perbatasan adalah langkah preventif yang penting untuk meningkatkan keamanan nasional dan menurunkan tingkat kejahatan di wilayah perbatasan (Al Jazeera, 2017). Dengan adanya tembok, diharapkan dapat mempersulit akses bagi para imigran ilegal dan kelompok kriminal untuk masuk ke wilayah AS. Kebijakan lain yang kontroversial Travel ban yang menargetkan beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman, dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman terorisme. Pelarangan perjalanan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa orang-orang dari negara-negara tersebut bisa menjadi ancaman keamanan karena potensi mereka untuk membawa ideologi ekstremis ke AS. (Immigration History, 2017). Trump berargumen bahwa kebijakan ini penting untuk mencegah

serangan teroris di tanah AS dengan membatasi akses dari negara-negara yang memiliki hubungan dengan kelompok teroris. Penerapan travel ban menghadapi banyak tantangan hukum dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Kritikus menyebutnya sebagai diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga berargumen bahwa travel ban tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan keamanan nasional. Meskipun demikian, Mahkamah Agung AS akhirnya mengesahkan versi ketiga dari travel ban pada Juni 2018, yang mencakup beberapa penyesuaian dan pengecualian tertentu. (BBC Newsround, 2017).

Kebijakan lain sebagai langkah sekuritisasi imigrasi dari Trump adalah zero tolerance, yang diumumkan pada April 2018, menginstruksikan jaksa federal untuk menuntut semua kasus imigrasi ilegal yang ditangkap di perbatasan. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan jumlah imigran ilegal dengan memberikan efek jera yang kuat. Dalam praktiknya, kebijakan ini menyebabkan pemisahan anak-anak dari orang tua mereka, yang memicu kecaman luas dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan masyarakat internasional. Pemisahan keluarga di perbatasan menjadi salah satu aspek yang paling kontroversial dari kebijakan zero tolerance (Kandel, 2021). Anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka ditempatkan di fasilitas penahanan sementara yang sering kali tidak memadai untuk kebutuhan mereka. Kebijakan ini dianggap tidak hanya kejam tetapi juga tidak efektif dalam jangka panjang, karena tidak mengatasi faktor-faktor pendorong imigrasi ilegal seperti kekerasan dan kemiskinan di negara asal imigran. Selain itu, pemisahan keluarga ini menimbulkan tantangan tambahan bagi penegakan hukum dan pengelolaan fasilitas penahanan.

Survei menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Trump, terutama pembangunan tembok perbatasan dan travel ban, memiliki dukungan yang signifikan dari basis pendukung Partai Republik. Banyak pendukung Trump setuju dengan pandangannya bahwa kebijakan ketat diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan mencegah imigrasi ilegal. Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menghadapi penolakan yang kuat dari masyarakat luas, terutama dari pendukung Partai Demokrat dan independen. Sebuah survei dari Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 57% responden menentang pembangunan tembok perbatasan, sementara 41% mendukungnya. Di sisi lain, survei dari Pew Research Center menunjukkan bahwa 62% responden mendukung DACA dan percaya bahwa imigran yang datang sebagai anak-anak harus diberikan kesempatan untuk tinggal dan bekerja secara legal di AS. Banyak organisasi hak asasi manusia, seperti American Civil Liberties Union (ACLU), secara vokal menentang kebijakan imigrasi Trump, terutama travel ban dan kebijakan zero tolerance. ACLU mengkritik travel ban sebagai bentuk diskriminasi terhadap Muslim. Beberapa lembaga advokasi yang

berfokus pada kebijakan imigrasi dan reformasi hukum, seperti Center for American Progress, juga mengkritik kebijakan Trump dimana mereka menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut terhadap ekonomi dan kesejahteraan imigran.

C. Perbandingan dan Kontrasti Sekuritisasi Imigrasi Obama dan Trump

Pendekatan kebijakan imigrasi Obama cenderung lebih humanis dan inklusif. Obama fokus pada reformasi imigrasi yang komprehensif dan perlindungan bagi imigran yang sudah berada di AS. Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) adalah salah satu kebijakan utama yang menunjukkan pendekatan humanis ini. Kebijakan ini memberikan perlindungan sementara dari deportasi kepada imigran muda yang datang ke AS sebagai anak-anak, serta memungkinkan mereka untuk bekerja secara legal di negara tersebut. Melalui DACA, Obama berusaha untuk memperbaiki kehidupan jutaan imigran tanpa dokumen dengan cara yang lebih empatik dan manusiawi (Daniel E. Martinez, 2018). Obama juga berusaha mendorong reformasi imigrasi komprehensif melalui upaya legislasi, meskipun reformasi ini gagal lolos di Kongres, upaya tersebut mencerminkan komitmen Obama untuk menangani masalah imigrasi secara holistik dan berkeadilan. Retorika Obama terkait imigrasi sering kali menekankan nilai-nilai kemanusiaan, inklusi, dan empati. Obama berbicara tentang pentingnya memberikan kesempatan kepada imigran muda yang dikenal sebagai "DREAMers" dan mengakui kontribusi mereka terhadap masyarakat AS. (Fathali, 2013). Dalam pidato-pidatonya, Obama sering kali menggarisbawahi pentingnya memperlakukan imigran dengan hormat dan bermartabat, serta perlunya mencari solusi yang adil dan manusiawi untuk masalah imigrasi (Slack, 2013).

Sebaliknya, pendekatan kebijakan imigrasi Trump jauh lebih keras dan restriktif. Trump menekankan penegakan hukum yang ketat dan peningkatan kontrol perbatasan. Pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko adalah simbol utama dari pendekatan ini. Trump berargumen bahwa tembok ini diperlukan untuk mencegah imigrasi ilegal, penyelundupan narkoba, dan masuknya kriminal ke AS. (Laidler, 2022). Travel ban yang diterapkan pada beberapa negara mayoritas Muslim juga mencerminkan pendekatan keras Trump. Meskipun kebijakan ini dikritik sebagai diskriminatif, Trump bersikeras bahwa langkah ini penting untuk keamanan nasional (Carter, 2018). Kemudian kebijakan zero tolerance, yang menginstruksikan penuntutan terhadap semua kasus imigrasi ilegal dan menyebabkan pemisahan keluarga di perbatasan, adalah contoh lain dari pendekatan keras Trump. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat terhadap imigrasi ilegal, meskipun menimbulkan krisis kemanusiaan dan kritik luas. Retorika Trump mengenai imigrasi cenderung keras dan konfrontatif. Trump sering kali menggambarkan imigran ilegal sebagai

ancaman terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan budaya AS. Dalam kampanye dan pidato kebijakan, Trump menggunakan bahasa yang kuat dan sering kali inflamatoris untuk menggambarkan imigran ilegal sebagai kriminal, teroris potensial, dan penyebab masalah sosial (Trump White House Archives, 2016). Retorika ini bertujuan untuk membangkitkan ketakutan dan kecemasan publik mengenai imigrasi, serta untuk mendapatkan dukungan bagi kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan restriktif.

Kebijakan imigrasi di era pemerintahan Obama dan Trump memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional dan masyarakat. Di bawah pemerintahan Obama, DACA membantu meningkatkan keamanan nasional dengan mengidentifikasi dan melacak imigran muda yang datang ke AS sebagai anak-anak. Dengan mendorong mereka untuk mendaftar dan memberikan informasi pribadi mereka, DACA membantu pemerintah dalam proses identifikasi dan penegakan hukum, sekaligus mengurangi tekanan pada sistem penegakan imigrasi dengan memfokuskan sumber daya pada ancaman yang lebih serius. Sebaliknya, kebijakan imigrasi Trump, seperti pembangunan tembok perbatasan, travel ban, dan kebijakan zero tolerance, berfokus pada penegakan hukum yang ketat dan kontrol perbatasan yang diperketat. Disamping itu, tanggapan dan respon publik terhadap kebijakan imigrasi di era Obama dan Trump sangat bervariasi. Di bawah pemerintahan Obama, kebijakan DACA mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama dari kelompok advokasi imigran dan organisasi hak asasi manusia. Survei oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung legalisasi DREAMers, meskipun ada beberapa oposisi yang kuat dari kelompok konservatif yang melihatnya sebagai bentuk amnesti yang tidak adil (Pew Research Center, 2017). Respon terhadap reformasi imigrasi komprehensif juga bercampur, dengan banyak yang mendukung jalan menuju kewarganegaraan bagi imigran tanpa dokumen, tetapi menghadapi oposisi di Kongres. Di era Trump, kebijakan imigrasi yang keras menuai banyak kritik dari organisasi hak asasi manusia, kelompok advokasi imigran, dan sebagian besar publik, yang melihatnya sebagai diskriminatif dan tidak manusiawi. Namun, ada juga dukungan yang signifikan dari basis pemilih Trump yang percaya bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kedaulatan negara (American Civil Liberties Union (ACLU), n.d.).

KESIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini menganalisis perbandingan sekuritisasi imigrasi antara era Obama dan Trump di Amerika Serikat serta dampaknya terhadap keamanan nasional. Pemerintahan Obama menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dengan program-program seperti DACA,

yang memberikan perlindungan bagi imigran muda. Ini mencerminkan usaha untuk menyeimbangkan keamanan nasional dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, Trump mengadopsi pendekatan yang lebih keras dengan fokus pada pembangunan tembok perbatasan dan kebijakan-kebijakan yang menegaskan sekuritisasi imigrasi sebagai ancaman. Kebijakan Trump ini menciptakan ketegangan politik dalam negeri dan mempengaruhi citra Amerika Serikat secara internasional, Perubahan dari era Obama ke Trump dalam kebijakan imigrasi mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks di Amerika Serikat. Pergeseran ini tidak hanya mempengaruhi kebijakan domestik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang diperjuangkan Amerika Serikat dalam kebijakan luar negeri dan hubungan internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Ahonen, M. (2019). DACA and immigration policy in the United States. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(7), 1215-1229.
- Alberto Beltran et al. (2018). *The economic and fiscal impact of repealing DACA*. Center for American Progress.
- American Civil Liberties Union (ACLU). (n.d.). A lifeline at risk. Retrieved from <https://www.aclu.org>
- BBC Newsround. (2017, December 6). Trump's US travel ban: What's the full story? Retrieved from <https://www.bbc.co.uk/newsround/38794001>
- Benenson, L. (2024, May 21). National Immigration Forum. Fact sheet: Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Retrieved from <https://immigrationforum.org/article/fact-sheet-on-deferred-action-for-childhood-arrivals-daca/>
- Brown, W. (2020). The politics of immigration in the Trump era. *Political Science Quarterly*, 135(1), 19-40.
- Buzan, B., et al. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Carter, J. (2018). The impact of Trump's travel ban on national security and public perception. *Journal of Policy Analysis and Management*.
- Daniel E. Martinez, J. S. (2018). Bordering on crisis: The politics of security and the fate of migrant families. *Journal of Borderlands Studies*.
- Fathali, H. (2013). The American DREAM: DACA, DREAMers, and comprehensive immigration reform. *Seattle University Law Review*, 37(221).
- Huysmans, J. (2006). *The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in the EU*. Routledge.

- Immigration History. (2017). Muslim travel ban. Retrieved from <https://immigrationhistory.org/item/muslim-travel-ban/>
- Jie Zong, J. B. (2018). Frequently requested statistics on immigrants and immigration in the United States. Migration Policy Institute.
- Kandel, W. A. (2021). The Trump administration's "Zero Tolerance" immigration enforcement policy. Congressional Research Service.
- Kossoudji, S. A. (2018). The economic and social effects of immigration policies in the United States. *International Migration Review*.
- Laidler, P. (2022). Divide and rule: Political impact of President Trump's US-Mexico border wall initiative. *POLITEJA*, 6(81), 254.
- Lucy Rodgers, D. B. (2020, October 31). BBC News. Trump wall: How much has he actually built? Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46824649>
- Ong, J. (2018). Border walls and security theatres: The politics of securitization and the making of the Trump wall. *Geopolitics*, 23(2), 409-431.
- Pew Research Center. (2017). Public continues to favor legalizing DREAMers, but not a larger immigration bill. Retrieved from <https://www.pewresearch.org>
- Reich, G. (2018). Hitting a wall? The Trump administration meets immigration federalism. *The Journal of Federalism*, 48(3), 372-395.
- Taufik, S. A. (2021). American first: Kebijakan Donald Trump dalam pembatasan kaum imigran ke Amerika Serikat. *Journal of International Studies*, 4-15.
- Trump White House Archives. (2016). Remarks announcing candidacy for president in New York City. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov>
- United States Citizenship and Immigration Services. (2020). Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Retrieved from <https://www.uscis.gov>
- University of Louisville. (2024, May 7). American Foreign Policy (Ziegler): Interest groups & public opinion. Retrieved from <https://library.louisville.edu/ekstrom/POLS333/publicopinion>
- Walters, W. (2019). *Security studies: An introduction*. London: Routledge.